

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022**



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
SUMBAWA BESAR**

Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 07 Kelurahan Samapuin
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. terwujudnya transparansi instansi Pemerintah. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dan juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar ditahun yang akan datang.

A. Latar Belakang dan profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar adalah tempat / sarana yang disediakan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan hukum dan pembinaan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana yang telah divonis oleh Pengadilan, berfungsi sebagai bagian dari alat hukum untuk menegakkan hukum di Indonesia.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistim, kelembagaan dan

cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam cara peradilan pidana (UU.No.12 Tahun 1995) bahwa petugas Pemasyarakatan adalah petugas penegak hukum yang berarti kita termasuk didalamnya suatu bagian dari integrated criminal justice sistem dengan tugas membina para pelanggar hukum/WBP agar kelak mereka dapat kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan pada akhirnya dapat berprestasi serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena itu pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi lingkungan dimana WBP nantinya akan kembali ketengah-tengah masyarakat.

Untuk menunjang keberhasilan pembinaan selain didukung oleh petugas dan warga binaan pemasyarakatan, salah satu unsur yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas kita juga mengikut sertakan dan menjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan masyarakat baik yang berada dilingkungan kita maupun dengan instansi-insatansi pemerintah, swasta dan sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar mulai dibangun tahun 1999 dan selesai tahun 2001 terletak dijalan raya jurusan Bima Km.07 merupakan Lembaga Pemasyarakatan baru pindahan dari gedung Lembaga Pemasyarakatan yang lama di jalan Ki Hajar Dewantara nomor 12 yang saat ini dialih fungsikan menjadi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sumbawa Besar.

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa Besar ini diresmikan dan dioperasikan tanggal 12 Agustus 2004, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar telah ditempati/difungsikan lebih kurang 13 tahun lamanya

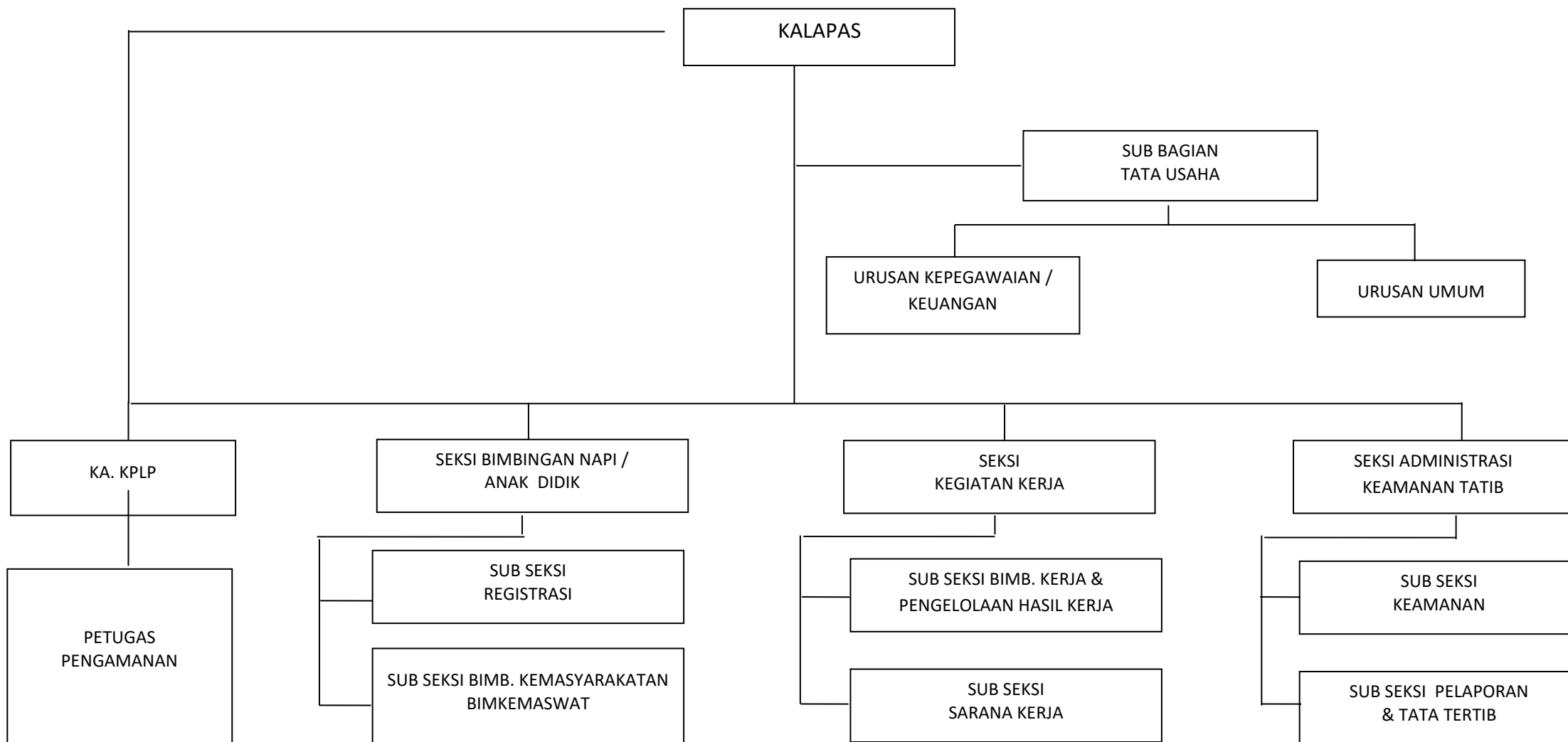
B. Tugas pokok dan Fungsi.

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak	melakukan pembinaan narapidana/anak didik
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan sosial/kerohaniannarapidana/anak didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, perlengkapan dan rumah tangga
Bidang Pembinaan Narapidana	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemasyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik
Bidang Kegiatan Kerja	Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Bidang Administrasi Kamtib	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengaman yg bertugas
Kesatuan Pengamanan Lapas	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA SUMBAWA BESAR



Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH.05.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dipimpin oleh M. FADLI, A.Md.IP., S.Sos., MM
2. Kepala Sub Bagian Tata usaha dipimpin oleh Muhamad Pauzan, S.Sos membawahi:
 - Kepala Urusan Kepegawaian/Keu. (Husni Thamrin, S.A.P)
 - Kepala Urusan Umum (LALU SATRIA JAGAT, S.Ag)
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) dipimpin oleh Sofian Hadi Sasmita, AMd.IP, SH. MH , membawahi:
 - Petugas Pengamanan
4. Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dipimpin oleh Muhammad Setiadin, A.Md.IP., SH membawahi:
 - Kepala Sub Seksi Registrasi (SITI NURMA, SH)
 - Kepala Sub Seksi Bimkemaswat (AHMADAN).
5. Kepala Seksi Kegiatan Kerja, dipimpin oleh Andi Oloan Sibarani, A.Md.IP., SH., MH membawahi:
 - Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (JOKO HASTA SA, SH)
 - Kepala Sub Seksi Sarana Kerja (AGUS SALIM)
6. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dipimpin oleh I KETUT MUSTIKA, S.Sos, membawahi:
 - Kepala Sub Seksi Keamanan (PANCAWATI, SH)
 - Kepala Sub Seksi Pelaporan. (ANWAR, SH).

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN:

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang aktifnya pegawai dalam memasukkan data dirinya kedalam SIMPEG. - Kurangnya SDM untuk operator SAIBA dll. - Kurangnya sarana dan prasarana kerja dalam melaksanakan tugas. - Terlambatnya proses penghapusan barang dari pejabat berwenang.
Kepala KPLP	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana prasarana keamanan - Minimnya petugas Jaga - Kurang sarana prasarana penunjang seperti X - Ray.
Kepala Seksi Binadik	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung Sistim Database Pemasyarakatan. - Kurangnya petugas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan.
Kepala Seksi Kegiatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana/ peralatan kerja - Tidak terdapat tenaga ahli di bidang kegiatan kerja.
Kepala Seksi Minkamtib.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana/ prasarana Kamtib.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2022 dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar. Target kinerja pada tingkat rencana strategis akan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran perencanaan kinerja. Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015-2022 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan.

Adapun rincian perjanjian kinerja terlihat pada tabel Perencanaan Kinerja sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	
			2020	2022
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase pelaksanaan pembinaan narapidana sesuai standar	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemasarakatan di wilayah	75%	80%
	Persentase pelaksanaan Kegiatan Kerja sesuai standar		75%	80%
	Persentase pemenuhan dukungan operasional tugas pokok dan fungsi sesuai standar		75%	80%
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar		75%	80%
	Persentase pelayanan informasi sesuai standar		75%	80%
	Persentase kerjasama pemsarakatan dengan Instansi lain sesuai standar		75%	80%

2.1 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan suatu bentuk kontrak kerja. Penetapan Kinerja keterkaitan antara sasaran dengan indikator kinerja dan besarnya target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan selama satu periode. Dari sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, akan dicapai melalui satu domain indikator kinerja yang telah disepakati sebagai kontrak kinerja. Indikator kinerja tersebut diurai lebih lanjut dalam wujud kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang disesuaikan dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022, dengan rincian kegiatan : struktur

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	ANGGARAN
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun secara tepat waktu	90%	Rp. 2.500.000,-
	Jumlah Dokumen laporan Keuangan yang disusun secara tepat waktu.	90%	Rp. 2.500.000,-
	Persentase pelaksanaan pembinaan narapidana sesuai standar	95%	Rp. 26.000.000,-
	Persentase pelaksanaan pembinaan Kegiatan Kerja sesuai standar	95%	Rp. 22.900.000,-
	Persentase pemenuhan dukungan operasional tugas pokok dan fungsi sesuai standar	95%	Rp. 1.608.570.000,-
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	95%	Rp. 122.286.000,-
	Persentase pelayanan informasi sesuai standar	95%	Rp. 3.500.000,-
	Persentase kerjasama pemasyarakatan dengan Instansi lain sesuai standar	95%	Rp. 1.000.000,-
	Jumlah pelaksanaan pencegahan keamanan dan ketertiban sesuai standar	95%	Rp. 3.000.000,-
	Jumlah pelaksanaan penindakan keamanan dan ketertiban sesuai standar	95%	Rp. 3.000.000,-
	Jumlah pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai standar	95%	Rp. 3.193.893.000,-
		Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.	95%

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar yang memiliki 5 (lima) Seksi, pada tahun 2022 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi amanah kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan dengan sasaran masing-masing. Melalui perjanjian ini diharapkan akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan perjanjian ini adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi; sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar melakukan monitoring dan evaluasi atas kemajuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar. Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dapat dilihat dalam lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu **instansi pemerintah** untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, dan mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara secara efektif, efisien dan ekonomis.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun secara tepat waktu	90%	50,90 %	50 %
	Jumlah Dokumen laporan Keuangan yang disusun secara tepat waktu.	90%	41,90 %	50 %
	Persentase pelaksanaan pembinaan narapidana sesuai standar	75%	43,76 %	50 %
	Persentase pelaksanaan pembinaan Kegiatan Kerja sesuai standar	75%	41,90 %	50 %
	Persentase pemenuhan dukungan operasional tugas pokok dan fungsi sesuai standar	75%	42,71 %	50 %
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	75%	42,71 %	50 %
	Persentase pelayanan informasi sesuai standar	75%	43,76 %	50 %
	Persentase kerjasama pemasyarakatan dengan Instansi lain sesuai standar	75%	43,76 %	50 %

3.1.1 Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa Besar

1. Persentase (%) Dokumen perencanaan Penganggaran dan Pelaporan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	TARGET (%)	REALISASI (%)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun secara tepat waktu.	97%	98,93 %

Yakni terselenggaranya Rapat Koordinasi penyusunan RKA-KL pada Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa Besar yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

2. Persentase (%) Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu.
- 3.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	TARGET (%)	REALISASI (%)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase (%) Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu.	97%	98,93 %

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal Persentase Persentase (%) Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu dan dilaksanakan pada setiap awal bulan.

Dokumen laporan keuangan yang disusun dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan laporan Keuangan

Realisasi : = 41,90

%Hasil Capaian : = 50 %

3. Persentase (%) UPT Pemasarakatan di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase pelaksanaan Pembinaan narapidana sesuai standar	75%	43,76 %	50 %

Pelaksanaan Pembinaan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA

Sumbawa Besar dilaksanakan dengan beberapa program yaitu:

1. Sidang TPP

Pelaksanaan pembinaan narapidana luar Lapas/ Rutan menjadi salah satu cara yang cukup efektif mengendalikan stabilitas kondisi keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan. Ancaman terjadinya gangguan Kamtib

disebabkan oleh tingkat hunian yang sangat tinggi selalu ada. Untuk itu, perlu optimalisasi program pembinaan melalui sidang TPP agar pemberian dan pelaksanaannya tepat sasaran dan terbebas dari kesalahan administrasi dan teknis. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah kegiatan sidang TPP selama satu Tahun.

Jumlah Sidang : Kali
 Target : Kali
 Realisasi : x (20/6 x 75
 %) = 50 % Hasil Capaian : 50 % =
 50 %

Dari pelaksanaan Sidang TPP di kantor wilayah telah terbit SK sebagai berikut:

PB : 20 berkas
 CMB : - berkas
 CB : 49 berkas
 Assimilasi : berkas

Selain dari SK yang telah keluar tersebut masih ada usulan sebagai berikut:

PB : 19 usulan
 CMB : 0 usulan
 CB : 20 usulan

2. Pemberian Remisi

Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana, merupakan program rutin dalam rangka pemenuhan HAM bagi Narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat. Dalam 2022 terdapat remisi sebanyak 5 Remisi Khusus yaitu; RK HR Imlek, RK HR Nyepi,, RK Sakit permanen, RK Lansia, RK HR Waisak

Dari kelima pemberian remisi di atas, untuk pemberian RK HR Imlek tercatat “Nihil” karena tidak ada Narapidana dan Anak pidana yang beragama Kong Hu Chu, RK Sakit permanen “Nihil” karena tidak ada usul dari UPT. Namun demikian, kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait pelaksanaan kedua remisi tersebut.

Data Pemberian Remisi TAHUN 2022

Remisi Imlek	Remisi Nyepi	Remisi PP	Remisi Idul Fitri	Remisi Natal	Remisi Umum	Remisi Dasawarsa	JUMLAH
			336	3	391		

4. % Pelayanan Perawatan Kesehatan sesuai standar

a. Diseminasi bidang Perawatan kesehatan Narapidana/ Tahanan;

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan layanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan yaitu terbatasnya anggaran untuk perawatan kesehatan, sementara Napi/ Tahanan yang tidak memiliki KTP tidak akan dilayani oleh fasilitas kesehatan yang ada. Untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan ini, maka perlu dilakukan penjajagan yang mengarah pada jalinan kerja sama antara Kemenkum dan HAM dengan Dinas Sosial ataupun BPJS. Oleh karena itu, perlu dilakukan Diseminasi pada bidang Perawatan dan Kesehatan.

5. % Pelayanan Informasi sesuai standar.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	TARGET (%)	REALISASI (%)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase Pelayanan Informasi sesuai standar	75%	43,76 %

a. Layanan Informasi

Tugas-tugas pembinaan Narapidana, Pelayanan Tahanan, sangat baik jika diketahui oleh masyarakat sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam proses Pemasyarakatan.

Terkait hal tersebut, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, telah dibuat spanduk berisi alamat Email dan Nomor pengaduan yang dapat dipergunakan menyampaikan kritik, saran, aspirasi demi terlaksananya proses pemasyarakatan yang baik.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran terlaksananya kegiatan pembuatan spanduk layanan informasi dan pengaduan.

Jumlah Kegiatan 1
 Target : 75 %
 Terlaksana : 1 (1/1 x 75 %=75 %
 Hasil capaian : 75/75 x 100% = 100%

b. Layanan Pengaduan

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik di Lapas, Lembaga Pemasyarakatan membuka layanan pengaduan dalam bentuk pengadaan kotak saran/ pengaduan yang di tempatkan di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa Besar.

c. Pengelolaan Database Pemasarakatan

Database Pemasarakatan kini menjadi andalan untuk memantau secara online kondisi hunian dan lingkungan sekitar Lapas/ Rutan. Di dalamnya terdapat SMS gateway sebagai proses input dan atau revisi data untuk kemudian dimunculkan pada Database Pemasarakatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran terlaksananya kegiatan pengarsipan data hunian Lapas/ Rutan setiap hari.

Jumlah Kegiatan : 1 Lembar setiap hari kerja
 Target : 1 Lembar setiap hari kerja
 Terlaksana : 1 Lembar setiap hari kerja
 Hasil capaian : 1 / 100 %

6. Persentase pelaksanaan pembinaan Kegiatan Kerja sesuai standar

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	TARGET (%)	REALISASI (%)
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase pelaksanaan pembinaan kegiatan kerja sesuai standar	75%	41,90 %

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran terlaksananya kegiatan kerja Lembaga Pemasarakatan pada setiap hari.

Jumlah Kegiatan : 1 kali setiap hari kerja
 Target : 1 kali setiap hari Kerja
 Terlaksana : 1 kali setiap hari kerja
 Hasil capaian : 1 / 100 %

7. Persentase dukungan operasional tugas pokok dan fungsi sesuai standar

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase pemenuhan dukungan operasional tugas pokok dan fungsi sesuai standar	75%	42,71 %	50 %

8. Persentase kerja sama pemasyarakatan dengan Instansi lain sesuai standar.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase kerjasama pemasyarakatan dengan Instansi lain sesuai standar.	75%	43,76 %	50 %

Tujuan dilaksanakannya kerjasama dengan Instansi lain ialah:

1. Menyamakan persepsi semua instansi penegak hukum dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana
2. Menjalin komunikasi antara instansi penegak hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pemenuhan HAM para pelaku tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa Besar
3. Menggugah partisipasi masyarakat dan utamanya instansi penegak hukum dalam upaya mengatasi permasalahan Over Croudit penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Selain dari itu untuk Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Instansi Terkait ditujukan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan kepentingan kedinasan lainnya bagi Para Penegak Hukum Baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dengan Kanwil Kemenkumham didaerah khususnya Sumbawa Besar sehingga terwujud kerjasama yang baik di seluruh aparaturnya Penegak Hukum dalam peningkatan pelayanan masyarakat.

Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik dan telah adanya Kerjasama yang baik dari pihak-pihak, sehingga penegakan dan pelaksanaan tugas dari masing-masing profesi berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

REALISASI ANGGARAN:

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari keuangannya yang merupakan bagian dari laporan kinerja.

Akuntabilitas keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dipaparkan sebagai berikut:

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2022. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasarakatan, kurun waktu Januari-Desember 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2015-2022 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2015-2022 .Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan pada Tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh Seki yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar adalah sebagai berikut :

- Kapasitas atau isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar mengalami kondisi *overload*
- Umumnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar terutama Petugas Pengamanan masih kurang dibanding porsetase isi Lembaga Pemasyarakatan.
- Lahan pertanian yang luas tidak diimbangi dengan alat dan sarana kerja memadai ditambah dengan petugasnya yang tidak pernah mengikuti diklat dan dukungan dari anggaran yang cukup.
- Adanya tembok keliling Lembaga Pemasyarakatan yang roboh sekitar 70 meter akibat bencana alam, sehingga memerlukan pengamanan ekstra, Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar.

A. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan SDM yang ada dalam melaksanakan tugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar.
- Telah mengusulkan ke Kantor |Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi |Manusia Nusa Tenggara Barat untuk penambahan pegawai.
- Mengoptimalkan tenaga pengaman Lapas/Rutan yang ada dan memperketat pengawasan

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang

Sumbawa Besar, 31 Desember 2022



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

M. FADLI

Nip.: 197805162000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUMBAWA BESAR DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75	100%	Tidak pernah terjadi gangguan keamanan di area lapas
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5	85%	Telah dilaksanakan bantuan pendampingan hukum dengan LKBH
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%	2%	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80	90	Terlihat dari indeks kepuasan masyarakat

	Berkualitas	2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80	90	Telah dilakukan kerja sama dengan APH
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80	90	Telah dilaksanakan pelayanan berbasis IT di Ruang ULTSP
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78	80	Telah dilaksanakan pelayanan Kesehatan oleh perawat
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53	60	Telah dilakukan pembinaan terjadwal dan dilaksanakan oleh para wali
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90	95	Telah terlaksana pentahapan integrasi tanpa biaya dan tidak ada keterlambatan
3.	Terwujudnya	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT	75	80	Tidak pernah terjadi gangguan keamanan yang berarti selama 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Pemasyarakatan			

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p>	<p>75%</p> <p>93%</p> <p>96%</p> <p>70%</p>	<p>95%</p> <p>95%</p> <p>98%</p> <p>75%</p>	<p>Telah sesuai dengan regulasi kerangka makanan dan jadwal 10 hari</p> <p>Tim perawat telah melaksanakan program jemput boila mencegah sakit wbp</p> <p>Telah dilakukan pengiriman kepada lapas perempuan mataram</p> <p>Sudah dilakukan perhatian khusus pada wbp yang sakit mental</p>

		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	85%	Sudah dilakukan pemisahan blok dan imunisasi lansia terjadwal
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	85%	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	75%	Sudah dilakukan screening dan koordinasi dengan pihak dinas Kesehatan kabupaten sumbawa terkait sosialisai HIV Aids
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	30%	Sudah dilakukan program lanjutan dari rehabilitasi social untuk meningkatkan kualitas pecandu menjadi non pecandu
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	70%	Telah dilaksanakan penilaian dengan system

Resiko Tinggi				SPPN
	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	Semua wbp yang berhak telah diberikan remisi
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	85%	Semua warga binaan sudah diberikan hak integrasi
	4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	85%	Telah difasilitasi menggunakan PKBM
	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	20%	Dilakukan pembinaan pada Napiter yang sudah ikrar seita NKRI
	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan	28%	35%	Sudah dilakukn pelatihan barista dan mendapatka n sertifikat sebagai barista 20 orang wbp

		vokasi bersertifikasi			
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	70%	Telah berjumlah 30 orang wbp yang asimilasi kebun Ai maja untuk program ketahanan pangan Jagung
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	85%	Sudah dilakukan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah pelayanan
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	75%	100% telah dilakukan penyelesaian antara lain perkelahiran antar wbp
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	85%	Seluruh wbp telah mengikuti aturan sesuai yang berlaku

		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	75%	Dilakukan sosialisasi saat kejadian telah terjadi guna melakukan tindak preventif
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	-		
		7. Jumlah Perangkat Pengolah data dan komunikasi.	4 Unit	4 Unit	
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	6 Unit	6 Unit	
		9. Jumlah Gedung/ Bangunan	-	-	

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.463.345.000,-

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 5.463.345.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.039.847.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 6.039.847.000,-

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : 407644 **LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR**

Hal 1 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	11,016,907,000	1,800,000	11,632,877,125	-785,661,009	10,847,216,116	98.46 %	167,890,884
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5,006,810,000	1,800,000	5,929,201,400	-1,003,565,408	4,925,635,992	98.38 %	79,374,008
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	5,006,810,000	1,800,000	5,929,201,400	-1,003,565,408	4,925,635,992	98.38 %	79,374,008
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4,913,930,000	1,800,000	5,868,764,400	-1,012,765,408	4,855,998,992	98.82 %	56,131,008
BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	141,615,000	0	124,952,000	10,100,000	135,052,000	95.37 %	6,563,000
051 Pembinaan Kepribadian	121,870,000	0	111,135,000	4,500,000	115,635,000	94.88 %	6,235,000
051.OA Konseling	6,840,000	0	6,763,000	0	6,763,000	98.87 %	77,000
521211 Belanja Bahan	2,040,000	0	1,963,000	0	1,963,000	96.23 %	77,000
522151 Belanja Jasa Profesi	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	100.00	0
051.OB Penyuluhan Hukum	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
051.OC Kegiatan Keagamaan	64,020,000	0	66,390,000	-2,900,000	63,490,000	99.17 %	530,000
521211 Belanja Bahan	5,000,000	0	7,300,000	-2,300,000	5,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52,720,000	0	52,490,000	0	52,490,000	99.56 %	230,000
522151 Belanja Jasa Profesi	6,300,000	0	6,600,000	-600,000	6,000,000	95.24 %	300,000
051.OD Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	12,210,000	0	10,410,000	1,000,000	11,410,000	93.45 %	800,000
521211 Belanja Bahan	1,730,000	0	580,000	1,000,000	1,580,000	91.33 %	150,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,830,000	0	9,830,000	0	9,830,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
051.OE Kegiatan Kesenian dan Olahraga	30,800,000	0	19,572,000	6,400,000	25,972,000	84.32 %	4,828,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,800,000	0	13,572,000	5,200,000	18,772,000	99.85 %	28,000
522151 Belanja Jasa Profesi	4,800,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	75.00 %	1,200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	50.00 %	3,600,000
052 Layanan Integrasi dan TPP	19,745,000	0	13,817,000	5,600,000	19,417,000	98.34 %	328,000
052.OA Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	4,620,000	0	3,500,000	1,100,000	4,600,000	99.57 %	20,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407644 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR

Hal 2 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	4,620,000	0	3,500,000	1,100,000	4,600,000	99.57 %	20,000
052.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	15,125,000	0	10,317,000	4,500,000	14,817,000	97.96 %	308,000
521211 Belanja Bahan	15,125,000	0	10,317,000	4,500,000	14,817,000	97.96 %	308,000
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	4,516,925,000	1,800,000	5,488,422,400	-1,022,865,408	4,465,556,992	98.86 %	49,568,008
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	4,516,925,000	1,800,000	5,488,422,400	-1,022,865,408	4,465,556,992	98.86 %	49,568,008
005.0A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	4,002,285,000	0	5,035,568,400	-1,034,660,398	4,000,908,002	99.97 %	1,376,998
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan	4,002,285,000	0	5,035,568,400	-1,034,660,398	4,000,908,002	99.97 %	1,376,998
005.0B Kebutuhan Sandang	129,200,000	0	129,200,000	0	129,200,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	129,200,000	0	129,200,000	0	129,200,000	100.00	0
005.0C Pemenuhan Sarana Makan Minum	57,060,000	0	56,850,000	0	56,850,000	99.63 %	210,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,060,000	0	56,850,000	0	56,850,000	99.63 %	210,000
005.0D Pemenuhan Perlengkapan Mandi	30,550,000	0	30,550,000	0	30,550,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,550,000	0	30,550,000	0	30,550,000	100.00	0
005.0E Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	5,000,000	0	4,885,000	0	4,885,000	97.70 %	115,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,000,000	0	4,885,000	0	4,885,000	97.70 %	115,000
005.0F Extra Fooding	91,650,000	0	91,650,000	0	91,650,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	91,650,000	0	91,650,000	0	91,650,000	100.00	0
005.0G Pemulasaran	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
005.0H Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	52,720,000	1,800,000	240,000	4,104,990	4,344,990	8.24 %	46,575,010
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	240,000	0	240,000	24.00 %	760,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,060,000	0	0	4,104,990	4,104,990	27.26 %	10,955,010
522191 Belanja Jasa Lainnya	36,660,000	1,800,000	0	0	0	0.00 %	34,860,000
005.0I Perlengkapan Medis Poliklinik	131,580,000	0	126,115,000	4,500,000	130,615,000	99.27 %	965,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	131,580,000	0	126,115,000	4,500,000	130,615,000	99.27 %	965,000
005.0J Penanganan dan Pencegahan Covid-19	13,880,000	0	10,364,000	3,190,000	13,554,000	97.65 %	326,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	13,880,000	0	10,364,000	3,190,000	13,554,000	97.65 %	326,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407644 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR

Hal 3 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BDC.S01 Pembinaan Kemandirian Narapidana	57,450,000	0	57,450,000	0	57,450,000	100.00	0
051 Perencanaan	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
052 Pelaksanaan	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	29,400,000	0	29,400,000	0	29,400,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0
053 Evaluasi dan Pelaporan	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
BDC.S02 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	197,940,000	0	197,940,000	0	197,940,000	100.00	0
051 Skrining dan Asesmen	15,900,000	0	15,900,000	0	15,900,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	15,900,000	0	15,900,000	0	15,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
052 Layanan Rehabilitasi Sosial	172,140,000	0	172,140,000	0	172,140,000	100.00	0
052.0A Asesmen Lanjutan	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
052.0B Konseling Adiksi	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	100.00	0
052.0C Extra Voeding	46,800,000	0	46,800,000	0	46,800,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	46,800,000	0	46,800,000	0	46,800,000	100.00	0
052.0D Case Conference Sidang Kasus	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
052.0E Terapi Kelompok	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407644 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR

Hal 4 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0
052.0F Family Support Group	840,000	0	840,000	0	840,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	840,000	0	840,000	0	840,000	100.00	0
053 Assesmen Akhir	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000	100.00	0
053.0A Pelaksanaan Asesment Akhir	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
BHB Operasi Bidang Keamanan	92,880,000	0	60,437,000	9,200,000	69,637,000	74.98 %	23,243,000
BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	92,880,000	0	60,437,000	9,200,000	69,637,000	74.98 %	23,243,000
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban	41,480,000	0	34,030,000	7,450,000	41,480,000	100.00	0
051.0A Penegakan Keamanan dan Ketertiban	41,480,000	0	34,030,000	7,450,000	41,480,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	5,400,000	0	4,200,000	1,200,000	5,400,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36,080,000	0	29,830,000	6,250,000	36,080,000	100.00	0
052 Pengawalan	51,400,000	0	26,407,000	1,750,000	28,157,000	54.78 %	23,243,000
052.0A Pengawalan Narapidana	16,800,000	0	10,200,000	1,750,000	11,950,000	71.13 %	4,850,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,800,000	0	10,200,000	1,750,000	11,950,000	71.13 %	4,850,000
052.0B Perpindahan (Mutasi) Narapidana	34,600,000	0	16,207,000	0	16,207,000	46.84 %	18,393,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	550,000	0	550,000	55.00 %	450,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,600,000	0	15,657,000	0	15,657,000	46.60 %	17,943,000
WA Program Dukungan Manajemen	6,010,097,000	0	5,703,675,725	217,904,399	5,921,580,124	98.53 %	88,516,876
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	6,010,097,000	0	5,703,675,725	217,904,399	5,921,580,124	98.53 %	88,516,876
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,833,247,000	0	5,546,540,651	213,072,999	5,759,613,650	98.74 %	73,633,350
EBA.956 Layanan BMN	24,450,000	0	14,290,000	9,400,000	23,690,000	96.89 %	760,000
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	14,250,000	0	5,290,000	8,200,000	13,490,000	94.67 %	760,000
051.0A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	14,250,000	0	5,290,000	8,200,000	13,490,000	94.67 %	760,000
521211 Belanja Bahan	5,850,000	0	600,000	5,100,000	5,700,000	97.44 %	150,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,400,000	0	4,690,000	3,100,000	7,790,000	92.74 %	610,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407644 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR

Hal 5 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	10,200,000	0	9,000,000	1,200,000	10,200,000	100.00	0
052.0A Administrasi Pengadaan Barjas	10,200,000	0	9,000,000	1,200,000	10,200,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	10,200,000	0	9,000,000	1,200,000	10,200,000	100.00	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	5,300,000	0	500,000	4,800,000	5,300,000	100.00	0
051 Penyediaan Informasi Publik	1,000,000	0	500,000	500,000	1,000,000	100.00	0
051.0A Penyediaan Informasi Publik	1,000,000	0	500,000	500,000	1,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	500,000	500,000	1,000,000	100.00	0
052 Kerja Sama	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	100.00	0
052.0A Kerja Sama	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	100.00	0
EBA.962 Layanan Umum	18,650,000	0	15,889,000	700,000	16,589,000	88.95 %	2,061,000
051 Urusan Umum	18,650,000	0	15,889,000	700,000	16,589,000	88.95 %	2,061,000
051.0A Urusan Umum	18,650,000	0	15,889,000	700,000	16,589,000	88.95 %	2,061,000
521211 Belanja Bahan	13,050,000	0	12,309,000	700,000	13,009,000	99.69 %	41,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,600,000	0	3,580,000	0	3,580,000	63.93 %	2,020,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	5,784,847,000	0	5,515,861,651	198,172,999	5,714,034,650	98.78 %	70,812,350
001 Gaji dan Tunjangan	4,837,567,000	0	4,688,541,100	136,284,556	4,824,825,656	99.74 %	12,741,344
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	4,813,564,000	0	4,688,541,100	118,451,556	4,806,992,656	99.86 %	6,571,344
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	3,241,997,000	0	3,238,805,380	340,400	3,239,145,780	99.91 %	2,851,220
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	83,000	0	75,764	0	75,764	91.28 %	7,236
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196,562,000	0	194,039,360	34,040	194,073,400	98.73 %	2,488,600
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	48,878,000	0	48,732,704	13,616	48,746,320	99.73 %	131,680
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	89,280,000	0	89,280,000	0	89,280,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	228,945,000	0	228,945,000	0	228,945,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	3,174,000	0	2,605,232	17,500	2,622,732	82.63 %	551,268
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	197,490,000	0	197,199,660	0	197,199,660	99.85 %	290,340
511129 Belanja Uang Makan PNS	779,540,000	0	661,483,000	118,046,000	779,529,000	100.00	11,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : 407644 **LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR**

Hal 6 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	27,615,000	0	27,375,000	0	27,375,000	99.13 %	240,000
001.0B Uang Lembur	24,003,000	0	0	17,833,000	17,833,000	74.29 %	6,170,000
512211 Belanja Uang Lembur	24,003,000	0	0	17,833,000	17,833,000	74.29 %	6,170,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	947,280,000	0	827,320,551	61,888,443	889,208,994	93.87 %	58,071,006
002.0A Kesehatan Pegawai	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
002.0B Pakaian Dinas	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000	100.00	0
002.0C Pemeliharaan Gedung	184,500,000	0	184,306,000	0	184,306,000	99.89 %	194,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	184,500,000	0	184,306,000	0	184,306,000	99.89 %	194,000
002.0D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	28,025,000	0	26,090,000	1,600,000	27,690,000	98.80 %	335,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24,200,000	0	22,890,000	1,000,000	23,890,000	98.72 %	310,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,825,000	0	3,200,000	600,000	3,800,000	99.35 %	25,000
002.0E Pemeliharaan Kendaraan	114,000,000	0	111,259,829	2,150,000	113,409,829	99.48 %	590,171
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114,000,000	0	111,259,829	2,150,000	113,409,829	99.48 %	590,171
002.0F Langganan Daya dan Jasa	168,600,000	0	133,169,393	12,863,379	146,032,772	86.61 %	22,567,228
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	54,000,000	0	46,753,300	4,234,110	50,987,410	94.42 %	3,012,590
522111 Belanja Langganan Listrik	86,400,000	0	77,940,583	7,697,444	85,638,027	99.12 %	761,973
522112 Belanja Langganan Telepon	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
522113 Belanja Langganan Air	27,600,000	0	8,475,510	931,825	9,407,335	34.08 %	18,192,665
002.0G Jasa Pos	4,800,000	0	131,000	0	131,000	2.73 %	4,669,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,800,000	0	131,000	0	131,000	2.73 %	4,669,000
002.0H Keperluan Perkantoran	75,500,000	0	62,085,840	13,125,175	75,211,015	99.62 %	288,985
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	40,500,000	0	31,195,840	9,125,175	40,321,015	99.56 %	178,985
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,000,000	0	30,890,000	4,000,000	34,890,000	99.69 %	110,000
002.0I Konsultasi dan Koordinasi	59,400,000	0	42,692,649	5,601,889	48,294,538	81.30 %	11,105,462

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : 407644 **LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR**

Hal 7 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,400,000	0	42,692,649	5,601,889	48,294,538	81.30 %	11,105,462
002.0J Jamuan Tamu	27,785,000	0	27,769,840	0	27,769,840	99.95 %	15,160
521211 Belanja Bahan	27,785,000	0	27,769,840	0	27,769,840	99.95 %	15,160
002.0K Honor Operasional Satuan Kerja	84,000,000	0	61,450,000	14,000,000	75,450,000	89.82 %	8,550,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	84,000,000	0	61,450,000	14,000,000	75,450,000	89.82 %	8,550,000
002.0L Penambah Daya Tahan Tubuh	81,760,000	0	59,856,000	12,548,000	72,404,000	88.56 %	9,356,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	81,760,000	0	59,856,000	12,548,000	72,404,000	88.56 %	9,356,000
002.0N Penanganan dan Pencegahan Covid-19	7,910,000	0	7,510,000	0	7,510,000	94.94 %	400,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	7,910,000	0	7,510,000	0	7,510,000	94.94 %	400,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	90,250,000	0	90,250,000	0	90,250,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	90,250,000	0	90,250,000	0	90,250,000	100.00	0
051 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	71,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000	100.00	0
051.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data	71,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000	100.00	0
053 Peralatan Fasilitas Perkantoran	19,250,000	0	19,250,000	0	19,250,000	100.00	0
053.0A Peralatan Fasilitas Perkantoran	19,250,000	0	19,250,000	0	19,250,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,250,000	0	19,250,000	0	19,250,000	100.00	0
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
051 Pembinaan Kepegawaian	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
051.0A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	79,100,000	0	59,385,074	4,831,400	64,216,474	81.18 %	14,883,526
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14,600,000	0	5,800,000	2,511,400	8,311,400	56.93 %	6,288,600
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	14,600,000	0	5,800,000	2,511,400	8,311,400	56.93 %	6,288,600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407644 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR

Hal 8 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Penyusunan RKAKL	14,600,000	0	5,800,000	2,511,400	8,311,400	56.93 %	6,288,600
521211 Belanja Bahan	2,600,000	0	500,000	0	500,000	19.23 %	2,100,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,000,000	0	5,300,000	2,511,400	7,811,400	65.09 %	4,188,600
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6,100,000	0	500,000	2,320,000	2,820,000	46.23 %	3,280,000
051 Penyusunan Laporan Kinerja	6,100,000	0	500,000	2,320,000	2,820,000	46.23 %	3,280,000
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja	6,100,000	0	500,000	2,320,000	2,820,000	46.23 %	3,280,000
521211 Belanja Bahan	2,100,000	0	500,000	0	500,000	23.81 %	1,600,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,000,000	0	0	2,320,000	2,320,000	58.00 %	1,680,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	10,600,000	0	8,068,100	0	8,068,100	76.11 %	2,531,900
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	10,600,000	0	8,068,100	0	8,068,100	76.11 %	2,531,900
051.0A Pengelolaan Sistem Akuntansi	10,600,000	0	8,068,100	0	8,068,100	76.11 %	2,531,900
521211 Belanja Bahan	2,600,000	0	800,000	0	800,000	30.77 %	1,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,000,000	0	7,268,100	0	7,268,100	90.85 %	731,900
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	47,800,000	0	45,016,974	0	45,016,974	94.18 %	2,783,026
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	47,800,000	0	45,016,974	0	45,016,974	94.18 %	2,783,026
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	47,800,000	0	45,016,974	0	45,016,974	94.18 %	2,783,026
521211 Belanja Bahan	3,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000	50.00 %	1,500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,800,000	0	43,516,974	0	43,516,974	97.14 %	1,283,026

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.